

ANALISIS DINAMIKA POLITIK PENCALONAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PADA PILKADA SERENTAK 2017

(Studi Kasus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Pati)

Ariska Rudy Hermayanti

ariskarudy@yahoo.com

Yuwanto

yuwantosaja@yahoo.com

Departemen Politik dan Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang

ABSTRAK

Pilkada serentak 2017 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari demokratisasi di tingkat lokal yang dilakukan secara langsung. Pada proses pilkada tersebut terdapat dinamika politik di dalamnya, termasuk dinamika yang menghasilkan kemenangan bagi pasangan calon. Salah satu bentuk dinamika politik adalah konflik pada proses pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah, tidak terkecuali Kabupaten Pati; termasuk konflik di dalam partai utama yang mengusung Haryanto-Arifin yaitu PDI Perjuangan. Penelitian ini tentang dinamika dan konflik dalam pilkada tersebut menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan telaah dokumen.

Pilkada serentak 2017 Kabupaten Pati hanya diikuti oleh satu pasang calon yang mestinya berjalan dengan lancar namun pada kenyataannya terdapat banyak dinamika politik yang melibatkan pasangan calon tunggal Haryanto-Arifin dan relawan kotak kosong. Pasangan calon Haryanto-Arifin diusung oleh koalisi gemuk yang terdiri dari 8 partai yaitu PDI Perjuangan, PKB, Golkar, Gerindra, Demokrat, PKS, PPP, dan Hanura. Berdasarkan perhitungan KPU Kabupaten Pati Haryanto-Arifin menang atas lawannya yaitu kotak kosong dengan perolehan 519.675 suara (74,4%), dibanding dengan lawannya kotak kosong meraih 177.762 suara (25,6)

Penelitian ini disusun untuk menganalisis dinamika politik yang terjadi pada Pilkada serentak 2017 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Pati. Dari pemunculan nama calon yaitu beberapa tokoh mendaftar ke DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pati, kemudian proses penjangkaran yang diadakan oleh DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pati namun yang berhak menentukan hanya DPP PDI Perjuangan. Konflik diantara bakal calon ketika tidak memperoleh rekomendasi dari pusat yang kemudian bergabung membentuk relawan kotak kosong, konflik seputar calon tunggal yaitu konflik pasangan calon Haryanto-Arifin melawan Relawan kotak kosong, isu politik uang yang dilaporkan ke Panwas, hingga pasca penetapan resmi calon terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati kemudian Gerakan masyarakat Pati mengajukan permohonan ke MK untuk membatalkan putusan KPU Kabupaten Pati.

Kata Kunci : Demokratisasi, Pilkada, Dinamika Poltik

PENDAHULUAN

Pemilihan Kepala Daerah merupakan suatu wujud nyata dari demokrasi dan menjadi sarana bagi rakyat dalam menyatakan kedaulatannya terhadap Negara dan Pemerintah.¹ Kedaulatan rakyat dapat diwujudkan dalam proses pemilu untuk menentukan siapa saja yang harus menjalankan dan mengawasi pemerintahan dalam suatu Negara. Dengan adanya pemilu maka telah melaksanakan kedaulatan rakyat sebagai perwujudan hak asas politik rakyat., selain itu dengan adanya pemilu maka dapat melaksanakan pergantian pemerintahan secara aman, damai dan tertib, kemudian untuk menjamin kesinambungan pembangunan nasional. Pilkada merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses suksesi kepemimpinan di kota atau kabupaten. Tahun 2017 ini telah dilaksanakan pesta demokrasi yang dikenal dengan pilkada serentak, dimana pada tahun ini terukir sejarah baru sekaligus tantangan terkait suksesi kepemimpinan di kota atau kabupaten untuk memilih kepala daerah yang resmi digelar secara serentak. Kabupaten Pati menjadi salah satu kabupaten yang ikut dalam pesta demokrasi tersebut tepatnya pada tanggal 15 Februari 2017.

Pilkada Kabupaten Pati dimenangkan oleh pasangan calon kepala daerah Haryanto calon wakil kepala daerah Saiful Arifin. Kemenangan Haryanto dan Saiful Arifin ini cukup menarik karena melihat pasangan ini mampu mengalahkan Kotak kosong. Kemenangan pasangan Haryanto-Arifin ini tidak lepas dari bagaimana awal proses pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Haryanto dan Saiful Arifin diusung oleh koalisi gemuk yang terdiri dari delapan (8) partai yaitu PDI Perjuangan, PKB, Golkar, Gerindra, Demokrat, PKS, PPP, dan Hanura. Meskipun pasangan Haryanto- Arifin didukung oleh koalisi gemuk namun Partai Utama yang mengusung pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Pati ini merupakan Partai PDI Perjuangan, pasangan calon kepala daerah Haryanto dan wakil kepala daerah Syaiful Arifin diusung oleh koalisi gemuk dikarenakan awalnya partai utama yang mengusung pasangan tersebut merupakan PDI Perjuangan namun PDI Perjuangan hanya menduduki 8 kursi di DPRD Kabupaten Pati maka PDI Perjuangan merangkul 7 partai lain untuk bersama-sama mengusung pasangan calon kepala daerah Haryanto dan calon wakil kepala daerah Syaiful Arifin. Pasangan calon kepala daerah Haryanto dan wakil kepala daerah Syaiful

¹ Pangsi Syarwi, *Titik Balik Demokrasi*, Jakarta, Pustaka Inteligencia, hlm 64, 2012.

Arifin diusung oleh PDI Perjuangan disebabkan oleh faktor Haryanto dan Saiful Arifin sendiri yang mendaftarkan diri secara Pribadi ke DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pati untuk dijadikan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah. Bahkan sebelumnya Haryanto telah mengikuti sekolah politik untuk bakal calon kepala daerah yang diselenggarakan oleh DPP PDI Perjuangan untuk menyatukan visi dan misi bagi para calon Kepala Daerah yang akan mendapat rekomendasi dari PDI Perjuangan.

Awalnya tidak hanya Haryanto saja yang mendaftar menjadi bakal calon Bupati PDI Perjuangan. Berikut merupakan nama-nama bakal calon bupati yang mendaftar pada PDI Perjuangan. Pertama, H. Haryanto,SH.MM.MSI. Kedua, H. Budiyono, SH. Ketiga, Amri Sodhiqin, SH.MH. Keempat,Sudewa, ST,MT. Dan yang mendaftar menjadi bakal calon wakil bupati Pati tidak hanya Saiful Arifin saja berikut merupakan nama-nama bakal calon wakil bupati dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Pertama, H. Budiyono,SH,MH. Kedua, Drs. Sumarno. MA. Ketiga, Saiful Arifin. Keempat, H. Endro Dwi Cahyono, ST. Kelima, Bambang Bejo Sihmono. Keenam, Soetarto Oenthera, SH.

Penjaringan nama-nama bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati dilakukan di DPC PDI Kabupaten Pati yang kemudian internal DPC PDI Perjuangan melakukan rapat internal partai. Hasil dari rapat internal partai kemudian dilakukan pengusulan resmi ke DPP PDI Perjuangan yang bertempat di Jakarta. DPP PDI Perjuangan melakukan survey elektabilitas para bakal calon bupati dan wakil bupati untuk memutuskan siapa bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati yang pantas untuk diusung oleh PDI Perjuangan yang kemudian direkomendasikan ke DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pati.

Tujuan dari pemilu selain untuk melaksanakan suksesi kepemimpinan juga tidak terlepas untuk mencari sosok yang ideal untuk memimpin daerah yang akan dipimpinya bila terpilih, namun terlepas dari peran figure pada Pilkada Kabupaten Pati tahun 2017 ini peran mesin parpol begitu dominan khususnya PDIP dalam memenangkan pasangan yang diusungnya yaitu Haryanto-Arifin. Berdasarkan perhitungan KPU Kabupaten Pati pasangan Haryanto-Arifin melawan kotak kosong memperoleh suara 74,4% sedangkan kotak kosong memperoleh suara sebesar 25,6%. Berdasarkan data tersebut Haryanto-Arifin unggul atas kotak kosong. Kemenangan pasangan Haryanto-Arifin ini lebih banyak ditentukan oleh kontribusi delapan partai pengusung akan tetapi yang jelas PDIP Kabupaten Pati memberikan kontribusi yang luar

biasa dalam menyusun strategi unuk memenangkan calon. Sedangkan peroleh kotak kosong sebesar 25,6% disebabkan oleh bangkitnya lawan politik masalalu, munculnya musuh baru dengan tidak sejalanya Budiyoно Wakil Bupati Pati, isu negatif tentang keberadaan pabrik semen di wilayah pati selatan, kemudian kebijakan selama Haryanto menjabat yang dianggap tidak pro rakyat.

Pada proses pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah pasti terdapat konflik di dalamnya, tidak terkecuali proses pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah pada pilkada serentak 2017 oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Konflik paling kuat terjadi antara 2 bakal calon kepala daerah yaitu Haryanto dan budiono. Konflik Bakal calon wakil kepala daerah antara Syaiful Arifin dengan Hendro. Konflik yang terjadi adalah konflik politik psikologis. Konflik-konflik justru dimunculkan oleh para pendukung dari bakal calon kepala daerah maupun bakal calon wakil kepala daerah supaya bakal calon yang didukungnya mendapatkan rekomendasi dari partai . Para pendukung selalu membuat aksi baik positive maupun negative.

Berdasarkan persoalan-persoalan yang dikemukakan sebelumnya, maka tulisan ini akan membahas beberapa poin: *Pertama*, pemunculan nama calon, proses penjaringan, konflik diantara bakal calon. *Kedua*, konflik seputar penetapan calon tunggal, isu politik uang. *Ketiga*, pasca penetapan resmi calon terpilih. *Keempat*, penutup berupa simpulan dan saran dari hasil penelitian ini.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi dimana dapat menggambarkan sifat suatu keadaan yang dilakukan penelitian dan memeriksa sebab akibat dari suatu gejala tertentu dengan melihat alasan dan latar belakang dari sebuah fakta, proses yang terjadi dibalik fenomena dinamika politik pilkada serentak dengan calon tunggal. Situs penelitian yang dipilih meliputi Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Pati, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati, dan Panwas Kabupaten Pati. Teknik pengumpulan data yang dilakukan antara lain dengan cara, wawancara mendalam dan dokumentasi. Selain itu peneliti juga menggunakan triangulasi sumber dan teori dalam upaya menyempurnakan hasil penelitian.

KERANGKA TEORI

Demokrasi sebagai metode untuk menentukan isi dari hukum atau peraturan yang mengikat lainnya (*legally binding decisions*) yang mana preferensi warga memiliki koneksi formal outputnya dan preferensi tersebut diperhitungkan secara adil. Dalam sebuah sistem demokratis, preferensi warga secara adil diperhitungkan dalam proses pengambilan keputusan dan terefleksi dalam hukum dan kebijakan-kebijakan pemerintah.² Satu poin penting yang perlu ditekankan di sini adalah bahwa dalam sebuah sistem yang demokratis “*eligible people in a polity participate actively not only in determining the kind of people that govern them, but also participate actively in shaping the policy output dari pemerintah*”. Sebuah sistem pemerintahan dikategorikan sebagai demokratis tidak hanya karena secara politis responsif terhadap warga melalui pemilu yang periodik, tetapi juga karena sistem tersebut terbuka untuk partisipasi bagi kelompok-kelompok marginal atau yang ter subordinasi.

Pemilihan umum merupakan sarana untuk memobilisasi dan menggerakkan dukungan rakyat terhadap Negara dan pemerintah dengan jalan ikut serta dalam proses politik. Hasil pemilu mencerminkan fungsi yang dikehendaki. Aurel croissant mengemukakan tiga fungsi pokok pemilu : yang pertama adalah fungsi keterwakilan (*representativeness*) dalam arti kelompok-kelompok masyarakat memiliki perwakilan ditinjau dari aspek geografis, fungsional, dan deskriptif ; yang kedua yakni fungsi integrasi dalam arti terciptanya penerimaan partai terhadap partai lain dan masyarakat terhadap partai ; yang terakhir yaitu fungsi mayoritas yang cukup besar untuk menjamin stabilitas pemerintah dan kemampuannya untuk memerintah (*governability*).³

Desentralisasi teritorial (*territorial decentralization*) yang menyangkut penyerahan kekuasaan dan kewenangan kepada pemerintah yang lebih rendah ketimbang desentralisasi fungsional (*functional decentralization*) yang merujuk pada desentralisasi kepada organisasi semi atau non-pemerintah. Beberapa ahli membedakan antara bentuk desentralisasi teritorial ke dalam beragam arti dan bentuk. Variasi ini didasarkan pada tiga perspektif yang berbeda, yaitu, derajat dari kewenangan dan kekuasaan, otonomi dari organisasi-organisasi yang diberi

²Rahmatunisa Mudiya, "Desentralisasi dan Demokrasi" *Jurnal Governance*, Vol 1, No 2, Mei 2012.

³ Joko J Prihatmoko, *Mendemokrasikan Pemilu: Dari Sistem Sampai Elemen Teknis*, Semarang, Pustaka Pelajar, hlm 32, 2008.

kekuasaan dan kewenangan, dan jenis dari kewenangan yang diserahkan yang harus dijalankan oleh level pemerintah daerah (pemda). Satu hal yang para akademisi sepakat adalah perbedaan-perbedaan ini menentukan tindakan yang khusus dan masing-masing bentuk dari desentralisasi territorial.

Pemilihan kepala daerah secara langsung adalah proses demokratisasi karena merupakan pembelajaran politik yang relevan dan merupakan upaya memperkuat sistem lokal dan otonomi daerah sebagai suatu proses demokratisasi.

Parameter pemilihan kepala daerah secara langsung⁴ perlu dipertimbangkan antara lain : *pertama*, pemilihan kepala daerah harus dilaksanakan secara demokratik yang member peluang bagi calon kepala daerah untuk berkompetisi secara *fair* dan jujur. *Kedua*, pemilihan kepala daerah secara langsung harus diarahkan pada terpilihnya kepala daerah yang lebih baik, lebih berkualitas, dan memiliki akuntabilitas politik yang tinggi dan derajat legitimasi yang lebih kuat karena kepala daerah yang terpilih mendapat mandate langsung dari rakyat. *Ketiga*, pelaksanaan pemilihan bersifat praktis, dalam arti proses dan tahap-tahap pemilihan tidak rumit dan mudah dimengerti oleh masyarakat. Praktik proses pemilihan harus dilangsungkan dengan lebih sederhana dan penetapan hasil pemilihan dilakukan secara terbuka dan transparan.

Secara umum partai politik adalah suatu kelompok organisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, serta cita-cita yang sama, dan mempunyai tujuan untuk memperoleh kekuasaan itu, melaksanakan kebijakan mereka.⁵Partai politik di Indonesia adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan Negara melalui pemilihan umum.

⁴ Ibid., hlm. 148

⁵Miriam Burdiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, hlm 200, 2002.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a) Proses Pencalonan

Pemunculan Nama Calon. Pada awal tahun 2016 atau satu tahun menjelang Pilkada Pati, sudah banyak nama yang bermunculan dalam bursa Pilkada Pati. Misalnya ada nama Sudewa, seorang pengusaha dari Kayen dan mantan Anggota DPR RI. ⁶Foto Sudewa bertebaran diberbagai sudut wilayah Pati sehingga seperti menjadi penanda kesiapannya dalam bursa Pilkada Pati. Sudewa berencana maju dalam Pilkada Pati lewat penjangkaran yang dilakukan PDI perjuangan Kabupaten Pati bersama dengan nama-nama lain seperti Budiyono (Wakil Bupati Pad), Haryanto (Bupati Pati), Saiful Arifin (Pengusaha), Ampri Shodiqin (Pejabat BUMN), Novi Eko Yulianto (Pengusaha), Endro Dwi Cahyono (Pengusaha), Budiyono (Anggota DPRD Pati), Sutarto Oenthera (Anggota DPRD Pati), Joko Wahyudi (Anggota DPRD Pati), Bambang Bejo Saliyo (Mantan Kades Sambirejo) dan Sumarno (Pengusaha).

Majunya Saiful Arifin sebagai calon Wakil Bupati Pati yang kemudian berpasangan dengan Haryanto , terpanggil karena tidak harmonisnya hubungan Haryanto dan Budiyono. Jika keduanya masih bersatu, barangkali bos Arifindo Group ini tidak berniat maju mendampingi Haryanto. Mengingat pengusaha yang berasal dari Mojoagung Trangkil ini, sudah cukup sukses di Jakarta dan cukup mapan dengan sejumlah hotel berbintangnya, salah satunya Hotel Safin yang berdiri megah di Kota Pati. Untuk pencalonan dari jalur perseorangan ada nama Sri Susahid. Pria asal Desa Payang Kecamatan Pati ini tercatat sudah beberapa kali berusaha ikut pemilihan, baik pemilihan legislatif, DPD, Bupati Pati maupun pemilihan Gubernur Jawa Tengah. Maka tak heran jika namanya sudah pernah terdengar. Namun sayang, nasib baik belum berpihak kepadanya. Berulang kali berusaha mencalonkan diri namun belum berhasil. Tetapi sampai batas akhir masa penerimaan dokumen dukungan syarat pencalonan bakal pasangan calon perseorangan. Sri Susahid tidak menyerahkan dokumen tersebut. Batalnya Sri Susahid dalam proses pencalonan ini disinyalir karena tidak menemukan calon wakil Bupati yang bersedia mendampinginya.

Nama lain yang ramai diperbincangkan akan maju melalui jalur perseorangan adalah bakal pasangan calon Surojo dan Suyuti. Surojo adalah PNS di Dinas Kesehatan yang ditugaskan

sebagai Sekretaris Desa Jepat Lor, Kecamatan Tayu. Sedangkan Suyuti adalah Kepala Desa Jepat Lor. Kendati diawal banyak tokoh bermunculan, dimasa pendaftaran pasangan calon pada tanggal 21-23 September 2016, hanya terdapat satu pasangan calon yang mendaftar di KPU Kabupaten Pati sebagai bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017, yaitu pasangan calon Haryanto dan Saiful Arifin, yang mendaftarkan diri pada tanggal 22 September 2016, pukul 10.00 WIB, dengan diusung oleh delapan partai politik Sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran, tidak ada perubahan pada komposisi dukungan partai politik dan tidak ada lagi pasangan calon baru yang diusung. Oleh karena itu, pada tanggal 24 Oktober 2016, KPU Kabupaten Pati menetapkan pasangan calon Haryanto dan Saiful Arifin sebagai calon tunggal melalui Keputusan Nomor: 48/Kpts/KPU-Kab-012.329311/2016. Dari paparan di atas, pemunculan nama bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pati, mendapati kenyataan bahwa hanya ada satu pasangan calon tunggal pada Pilkada serentak 2017.

Proses Penjaringan. Peran partai politik sebagai kendaraan politik pada proses pencalonan pada pemilihan kepala daerah terdapat Tahapan penjaringan, menjaring semua tokoh baik dari internal partai maupun tokoh umum. Setelah penjaringan dilakukan penyaringan setelah penyaringan nanti ditentukan pasangan calon yang mendapatkan rekomendasi dari partai. Kemudian partai akan mengadakan survei dilihat dari aspek popularitas, elektabilitas, potensi untuk menang, ketokohan di daerah memiliki finansial cukup. PDI Perjuangan pada prinsipnya tegak lurus apa yang menjadi keputusan DPP Partai dalam hal ini merupakan keputusan ketua umum Megawati Soekarno Putri, dalam pemilukada Kab.Pati 2017 DPP merekomendasi Pak Haryanto dan Syaiful Arifin untuk mengikuti Pilkada 2017, proses penjaringan diatur dalam peraturan partai atau atas instruksi partai. Dimulai dari penjaringan tingkat PAC kemudian DPP membuka pendaftaran para calon melengkapi administrasi, ketua DPC hanya menerima pendaftaran namun direkomendasi atau tidaknya itu menunggu keputusan DPP kemudian diteruskan di DPD kemudian DPD melakukan Fit and Proper Test masing-masing bakal calon namun yang bisa merekomendasi hanya DPP.

Konflik diantara Bakal Calon. Pilkada serentak 2017 di Kabupaten Pati khususnya pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Konflik persaingan diantara bakal calon, konflik gesekan paling kuat terjadi antara 2 bakal calon kepala daerah Haryanto dan Budiyono. Konflik bakal calon kepala daerah antara Saiful Arifin dengan Hendro. Konflik yang terjadi adalah

konflik politik psikologis. Konflik-konflik justru dimunculkan oleh para pendukung dari bakal calon kepala daerah maupun bakal calon wakil kepala daerah supaya bakal calon yang didukungnya mendapatkan rekomendasi para pendukung selalu membuat action baik, action positif maupun negatif.

Dari pusat akan melakukan survey mana pasangan gambar yang paling banyak, kemudian survei melalui polling dengan cara mengambil sample. Konflik yang terjadi adalah pencemaran nama bakal calon melalui pamphlet. Salah satu calon ada yang di *Blackcampaign*. *Black campaign* yang bermakna berkampanye dengan cara buruk atau jahat. Secara umum bentuk kampanye hitam adalah menyebarkan keburukan atau kejelekan seorang politikus dengan tujuan menjatuhkan nama baik seorang politikus sehingga dia menjadi tidak disenangi teman-teman separtainya, khalayak pendukungnya dan masyarakat umum. Kampanye hitam tidak sama dengan kampanye negatif.

b) Pascapencalonan Resmi

Konflik Seputar Penetapan Calon Tunggal. Pascapencalonan resmi ke KPU Kabupaten Pati terjadi konflik di seputar Penetapan Calon Tunggal. Konflik melibatkan pasangan calon Haryanto-Arifin melawan relawan kotak kosong. Banyak spekulasi bermunculan terkait siapa tokoh-tokoh dibalik gerakan relawan kotak kosong di Pati. Ada yang menduga bahwa gerakan ini dimotori oleh Budiyo selaku Wakil Bupati Pati yang memang dalam beberapa tahun terakhir sudah tidak sepeham lagi dengan Haryanto selaku Bupati Pati. Disamping itu, Budiyo adalah salah satu orang yang tidak bisa maju karena yang bersangkutan tidak mendapatkan kendaraan partai politik untuk maju dalam Pilkada 2017. Sebab, hampir semua kursi DPRD Pati mendukung Haryanto-saiful Arifin. Anggota DPRD Kabupaten Pati dari partai nasdem, misalnya Hj. Muntamah, juga turut membesarkan gerakan kotak kosong. Sebab, ya itu tadi, nasdem adalah satu – satunya partai yang tidak mengusung Haryanto – saiful Arifin. Beberapa tokoh yang sejak awal mendeklarasikan diri sebagai bakal calon yang pada akhirnya tidak jadi mencalonkan diri karena terhalang partai pengusung, disinyalir juga berada di belakang relawan kotak kosong, atau setidaknya – setidaknya sebatas simpatisan. Masyarakat Pati yang selama ini menolak pendirian pabrik semen di Sukolilo, Kayen dan Tambakromo juga ada yang ikut mendukung gerakan kotak kosong. Selain partai nasdem, setidaknya ada dua organisasi yang secara tegas mendukung dan

menyuarakan kotak kosong dalam proses pilkada di Pati, yaitu: Aliansi kawal demokrasi Pilkada Pati (AKDP) dan forum Komunikasi LSM penegak Demokrasi Kabupaten Pati (FKLSMPD).

Isu Politik Uang. Dari sekian isu pelanggaran yang ada dalam Pilkada serentak 2017 Kabupaten Pati, yang sangat menarik perhatian adalah isu dugaan pelanggaran politik uang. Sebanyak 14 dugaan politik uang dilaporkan oleh masyarakat kepada Panwas Kabupaten Pati pada masa akhir kampanye sampai dengan masa tenang, dugaan politik uang terjadi di 9 kecamatan yang ada di Kabupaten Pati. Semuanya dilakukan oleh pihak pasangan calon Haryanto dan Arifin. Pelapor atau saksi pada 10 laporan menyatakan mencabut laporannya atau mencabut keterangannya. Pelapor atau saksi yang mencabut adalah mereka yang dalam peristiwa menerima uang yang diduga politik uang itu. Sebelumnya banyak saksi yang membuat surat pernyataan telah menerima amplop berisi uang. Pencabutan keterangan atau laporan itu dilakukan saat proses pemeriksaan. Pencabutan dilakukan setelah mereka mengetahui adanya aturan yang menyebut penerima politik uang juga bisa dikenakan hukuman. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187A ayat (1) dan (2) UU Pilkada.

c) Pascapenetapan Resmi Calon Terpilih

Tanggal 23 Februari 2017 KPU Kabupaten Pati telah selesai merekap hasil perhitungan suara di 21 kecamatan. Hasilnya, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pati Haryanto dan Saiful Arifin memperoleh suara sebanyak 519.675 suara. Sedangkan kolom kosong memperoleh suara sebanyak 177.762 suara. Sehingga total suara sah sebanyak 697.437 suara.

Hasil rekapitulasi itu kemudian ditetapkan oleh KPU Kabupaten Pati dengan Keputusan Nomor : 16/Kpts/KPU-Kab.012.329311/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 tertanggal 23 Februari 2017. Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan suara di tingkat Kabupaten dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017 tanggal 23 Februari 2017, Pasangan calon Haryanto dan Saiful Arifin memperoleh suara terbanyak atau memenangkan suara di semua kecamatan yang ada di Kabupaten Pati, hanya di beberapa Kecamatan, suara kolom kosong terlihat sangat signifikan, seperti di juwana, Kayen Margoyoso, Pati, Tambakromo, Tayu, Trangkil dan Wedarijaksa.

Pascapenetapan resmi calon terpilih kemudian Gerakan Masyarakat Pati (Geram Pati) mengajukan permohonan mengajukan permohonan pada tanggal 28 Februari 2017 dan deregister oleh MK dengan nomor perkara 41/PHP.BUP-XV/2017 ke Mahkamah Konstitusi agar keputusan KPU Kabupaten Pati dibatalkan. Terhadap permohonan itu, MK memutuskan bahwa permohonan yang diajukan oleh Geram Pati dinyatakan tidak diterima. Putusan yang dibacakan pada 4 April 2017 itu menyatakan bahwa permohonan yang diajukan oleh Geram Pati telah melebihi tenggang waktu yang ditentukan sehingga dinyatakan tidak dapat diterima

PENUTUP

Dalam proses pemunculan nama calon banyak nama yang bermunculan dalam bursa Pilkada Pati. Dinamika Politik pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah pada pilkada serentak 2017 terjadi dalam berbagai tahapan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses pencalonan terdapat dinamika dan konflik. Pada proses pemunculan nama calon terdapat banyak calon dengan latar belakang profesi yang berbeda-beda. Misalnya ada Wakil Bupati Pati, Bupati Pati, pengusaha, pejabat BUMN, anggota DPRD Pati, mantan Kades. Para tokoh dari berbagai latar belakang tersebut mengambil formulir pendaftaran lewat penjangkaran yang dilakukan oleh DPC PDI Perjuangan Pati. Untuk desas-desus pencalonan dari jalur perseorangan ada nama Sri Susahid. Ia disebut-sebut juga akan ikut memeriahkan Pilkada Pati. Dalam proses penjangkaran terdapat banyak tokoh yang mendaftar di DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pati seperti nama-nama yang telah dipaparkan di atas pada proses pemunculan nama calon. Walaupun banyak yang mendaftar pada DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pati yang memiliki kewenangan untuk memutuskan hanya DPP PDI Perjuangan dan dalam pemilukada Kab.Pati 2017 DPP merekomendasi pasangan calon Haryanto dan Syaiful Arifin untuk mengikuti Pilkada 2017.

Dalam hal konflik diantara bakal calon Konflik persaingan diantara bakal calon, konflik gesekan paling kuat terjadi antara 2 bakal calon kepala daerah Haryanto dan Budiyono. Konflik bakal calon kepala daerah antara Saiful Arifin dengan Hendro. Konflik yang terjadi adalah konflik politik psikologis kemudian *blackcampaign*. Konflik seputar penetapan calon tunggal, Konflik melibatkan pasangan calon Haryanto-Arifin melawan relawan kotak kosong. Banyak spekulasi bermunculan terkait siapa tokoh-tokoh dibalik gerakan relawan kotak kosong di Pati. Ada yang menduga bahwa gerakan ini dimotori oleh Budiyono selaku Wakil Bupati Pati yang memang dalam beberapa tahun terakhir sudah tidak sepaham lagi dengan Haryanto selaku Bupati

Pati., anggota DPRD Kabupaten Pati dari partai nasdem, misalnya Hj. Muntamah, juga turut membesarkan gerakan kotak kosong. Sebab nasdem adalah satu – satunya partai yang tidak mengusung Haryanto – saiful Arifin, tokoh-tokoh yang mengikuti proses penjaringan pada DPC PDI P namun tidak memperoleh rekomendasi dari pusat, masyarakat Pati yang selama ini menolak pendirian pabrik semen di Sukolilo, Kayen dan Tambakromo juga ada yang ikut mendukung gerakan kotak kosong. Selain partai nasdem, setidaknya ada dua organisasi yang secara tegas mendukung dan menyuarakan kotak kosong dalam proses pilkada di Pati, yaitu: Aliansi kawal demokrasi Pilkada Pati (AKDP) dan forum Komunikasi LSM penegak Demokrasi Kabupaten Pati (FKLSMPD). Dari sekian isu pelanggaran yang ada dalam Pilkada serentak 2017 Kabupaten Pati, yang sangat menarik perhatian adalah isu dugaan pelanggaran politik uang. Sebanyak 14 dugaan politik uang dilaporkan oleh masyarakat kepada Panwas Kabupaten Pati pada masa akhir kampanye sampai dengan masa tenang, dugaan politik uang terjadi di 9 kecamatan yang ada di Kabupaten Pati. Semuanya dilakukan oleh pihak pasangan calon Haryanto dan Arifin. Pascapenetapan resmi calon terpilih oleh KPU Kabupaten Pati, Gerakan Masyarakat Pati (Geram Pati) mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi agar keputusan KPU Kabupaten Pati dibatalkan. Terhadap permohonan itu, MK memutuskan bahwa permohonan yang diajukan oleh Geram Pati dinyatakan tidak diterima. Putusan yang dibacakan pada 4 April 2017 itu menyatakan bahwa permohonan yang diajukan oleh Geram Pati telah melebihi tenggang waktu yang ditentukan sehingga dinyatakan tidak dapat diterima.

SARAN

Partai politik merupakan satu-satunya lembaga yang sah untuk mengusung pasangan calon dalam pilkada. Maka dari itu partai politik perlu memaksimalkan dalam Pendidikan dan Pengkaderan. Dengan demikian, hal itu merupakan upaya meminimalisir munculnya calon tunggal dalam Pilkada. kemudian diberikan wadah untuk masyarakat yang kontra terhadap pasangan calon yang ada sehingga masyarakat dapat mengemukakan pendapat, termasuk pilihan politik. Terkait dengan pemberantasan politik uang yang kerap terjadi dalam setiap pemilihan, jangan sampai hanya mengandalkan pendekatan hukum, tetapi juga pendekatan-pendekatan seperti budaya atau pendidikan politik yang harus dilakukan oleh partai politik, pasangan calon, penyelenggaraan pemilu maupun elemen masyarakat lainnya. Selebihnya mari kita bersama-sama beritikad baik, berusaha semaksimal mungkin dan berdoa agar

penyelenggaraan pilkada di Indonesia di kemudian hari semakin membaik dan dapat menghasilkan pemimpin daerah yang peduli dan memajukan kehidupan rakyatnya.

Daftar Pustaka

Buku:

Badjuri, Abdulkahar. 2010. *Dinamika Politik Nasional*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra

Budiardjo, Miriam. 2002. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama

Haryanto. 2004. *Partai Politik, Suatu Tinjauan Umum*. Yogyakarta: Liberty

Joko J. Prihatmoko. 2008. *Mendemokrasikan Pemilu: Dari Sistem Sampai Elemen Teknis*.

Semarang: Pustaka Pelajar

Syarwi, Pangi. 2012. *Titik Balik Demokrasi*. Jakarta: Pustaka Inteligencia

Jurnal:

Rahmatunnisa, Mudiwati. 2011 "Desentralisasi dan Demokrasi" *Jurnal Governance*, Vol 1, No 2,

Mei 2012